

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM MAKASSAR TA' TIDAK
RANTASA DI KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR**

Disusun Dan Diusulkan Oleh:

MUH. MUSLIM KAHAR

Nomor Stambuk : 105640104910



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

PENGAJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM MAKASSAR TA' TIDAK
RANTASA DI KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Implementasi Program Makassar Ta' Tidak Rantasa Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar**

Nama Mahasiswa : Muh. Muslim Kahar

Stambuk : 10564 010409 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Ir. H. Saleh Molla, MM

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan

A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

PENERIMA TIM

Telah di terima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor : 1184/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Sabtu tanggal 26 bulan agustus tahun 2017.



TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,

Ir. H. Saleh Molla, MM

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M. Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
2. Drs. Alimuddin Said, M.Pd
3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH
4. Abd Kadir Adys, SH, MM

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawahini:

NamaMahasiswa : Muh. Muslim Kahar

NomorStambuk : 10564 01049 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Agustus 2017
Yang Menyatakan,

Muh. Muslim Kahar



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AssalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang tercinta kedua orang tua saya, Ayahanda Alm Purn Peltu Kahar Abdullah dan Ibunda Nuareni yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendoakan serta memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini. Tak lupa pula saya haturkan terimakasih yang tak terhingga kepada ibu Dr.Hj. Fatmawati, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta senantiasa memberikan motivasi, arahan dan bimbingannya sehingga selesainya penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga saya haturkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Idris, M.Si (Alm) selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah mengelola fakultas dengan sebaik-baiknya.
2. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.
4. Seluruh jajaran staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selalu siap membantu keperluan mahasiswa dan dosen.
5. Bapak Hamri Haiya, SP, M.Si selaku Kepala Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang telah memberi ijin untuk meneliti beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis selama proses penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Buat saudara-saudaraku tercinta Irma Suryani, Nur Hidayah dan Mutohharah Syakir yang senantiasa memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

WassalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Makassar, Agustus 2017

Muh. Muslim Kahar

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan TIM	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pemerintahan Daerah.....	9
B. Konsep Implementasi.....	10
C. Program Makassar Tidak Rantasa (MTR).....	15
D. Kerangka Pikir.....	16
E. Fokus Penelitian.....	18
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	21
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	21
C. Sumber Data.....	22
D. Informan Penelitian.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis Data	24
G. Keabsahan Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Lokasi Penelitian.....	28
B. Implementasi Program Makassar Tidak Rantasa (MTR)	28
C. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1 DaftarNamaInforman.....	31
Tabel 2 Data LembagaNiaga.....	37
Tabel 3 Data SaranaPendidikan.....	37
Tabel 4 Data FasilitasUmum.....	38
Tabel 5 Data SaranaIbadah.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, maka teknologi informasi juga terus meningkat, kebutuhan masyarakat akan keterbukaan dan akses yang lebih cepat merupakan suatu kebutuhan yang tak dapat dibendung lagi. Pelayanan yang prima dan cepat merupakan tuntutan dari masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena arus globalisasi dan informasi yang bergerak begitu cepat. Pemerintah dalam hal ini merupakan penyedia jasa publik terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai konsep akan pelayanan publik terus dikembangkan. Dimulai dari tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan salah satu konsep yang dijalankan oleh suatu daerah dalam rangka pencapaian tujuan negara/daerah. Tak hanya sampai disitu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka telah muncul beberapa konsep dan paradigma baru dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan terbuka.

Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat di perkotaan menimbulkan berbagai permasalahan khas perkotaan, seperti penurunan kualitas pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan pemukiman, kemacetan di jalan raya, kesulitan mendapatkan tempat parkir, membengkaknya tingkat konsumsi energi, penumpukan sampah, peningkatan angka kriminal, dan masalah-masalah sosial lainnya. Masalah-masalah ini akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan semua masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan

cepat dan tepat jika masih menggunakan solusi konvensional yang digunakan saat ini.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah dan mewujudkan cita-cita kota (aman dan nyaman) untuk penduduknya, diperlukan solusi cerdas dan gegas (cergas) agar penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan masalah itu sendiri. Solusi cerdas di sini adalah dengan penerapan dan kolaborasi ekosistem kota yang masuk ke dalam konsep *Smart City*. Dalam konsep solusi *Smart City* ini, pemerintah, industri, akademis, maupun masyarakat ikut terlibat untuk menjadikan kota menjadi lebih baik.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan dambaan bagi semua Negara, terkhusus di Indonesia. Tujuan ini dibuktikan dengan semakin inovatifnya pemerintah pusat dan daerah/kota dalam melaksanakan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Ibu kota yang juga merupakan pintu gerbang dari Indonesia bagian timur yang merupakan jalur perdagangan, ekonomi, sosial, politik, dan segala kemajuan maka Kota Makassar mempunyai potensi untuk menjadi sebuah kota dunia bahkan *Smart City* atau kota pintar yang dapat menjadi kota idaman bagi masyarakat baik dari Indonesia maupun luar negeri. Kesiapan Kota Makassar akan hal itu terbukti dari perkembangan infrastruktur di kota Makassar yang berkembang dengan pesat. Infrastruktur kota yang lebih maju dan lengkap, menegaskan arah Makassar menuju kota megapolitan semakin jelas. Infrastruktur jalan yang makin lengkap dengan berbagai pembangunan jalan lingkar, fly offer dan perluasan jalan tol serta

pelebaran jalan di ruas-ruas kota semakin menegaskan kesiapan kota Makassar dalam menyongsong predikat sebagai kota dunia.

Berbagai upaya dan studi telah dilakukan, seperti studi *electronic governance (e-government)* serta inovasi pemerintahan yang berujung pada pendekatan baru yang mengharapkan kota lebih cerdas (*smart*). Kota yang lebih cerdas digambarkan sebagai kota yang mampu melayani dan menciptakan kota yang nyaman untuk hidup bagi warganya, kota yang lebih cerdas ini dikenal dengan istilah (*smart city*). Secara umum *smart city* dalam berbagai literatur dan hasil riset, terbagi dalam berbagai aktivitas/karakteristik yaitu :*smart economy, smart people, smart governance, smart mobility, smart environment, dan smart living.*

Konsep Smart City pada hakikatnya adalah sebuah konsep yang menempatkan sebuah kota sebagai sebuah ekosistem dari banyak subsistem untuk saling terinterkoneksi dan mendukung sehingga suatu kota tetap tumbuh dan berkelanjutan (*Sustainable Cities*). Menurut Budi Santoso, anggota Lembaga Inisiator Smart City Award Indonesia, dalam artikelnya di Kompas berjudul “Mimpi wujudkan Smart City” terdapat enam komponen utama sebuah kota yang dapat dikategorikan Smart yaitu: 1) Memiliki sumber energi yang terbaru serta penggunaan energi yang efisien, 2) Memiliki sistem pengelolaan air bersih dan limbah, 3) Memiliki sistem transportasi dan logistik hijau, 4) Menghasilkan produk dan jasa ramah lingkungan, 5) Membangun gedung dan interior yang hijau, 6) Memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang ramah lingkungan.

Meningkatnya jumlah penduduk turut berpengaruh pada ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, ketersediaan energi, dan perubahan iklim. Guna mengantisipasi dampak-dampak buruk perubahan tersebut maka kebutuhan akan gagasan-gagasan terbaik (cerdas) dalam mengelola kota semakin mendesak. Oleh sebab itu para pemimpin kota dituntut untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas guna menemukan serta menerapkan cara-cara terbaik memecahkan segala persoalan kota.

Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan tentunya tak luput dari permasalahan persampahan. Jumlah penduduk yang begitu besar menghasilkan timbunan sampah yang besar pula. Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Hal ini merupakan masalah yang cukup besar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar.

Kota Makassar di bawah kepemimpinan Mohammad Ramadhan Pomanto sebetulnya juga telah memulai langkah Makassar menuju kota cerdas dengan meluncurkan program Kartu Pintar (Smart Card) yang pada dasarnya berfungsi sebagai alat transaksi dan basis data. Langkah Pemerintah Kota tersebut patut diapresiasi, akan tetapi program-program yang dikreasi oleh pemerintah kota hendaknya lebih berpijak pada masalah-masalah aktual dan konkret di Kota Makassar. Dalam kaca mata penulis ada dua tantangan dan mendesak yang harus dipecahkan secara cerdas oleh Pemerintah Kota Makassar, pertama adalah masalah kemacetan kota dan kedua adalah masalah pengelolaan sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi, pengelolaan sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam pelaksanaan konsep tersebut diharapkan instansi pemerintah dapat bekerjasama, bersinergi, bahu membahu dalam mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Sebagai upaya merubah watak atau perilaku manusia atau kelompok atau merealisasikan program-program yang semula cenderung bekerja atau berjalan sendiri-sendiri baik di lingkungan masyarakat maupun

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mengatasi persoalan sampah, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011, tentang pengelolaan sampah, Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Kebijakan Program Makassar 'Tidak Rantasa' (MTR), 15 Juni 2014, tentang penanganan kebersihan, dengan sejumlah strategi untuk mencapai keberhasilannya antara lain: 1. Kerja bakti (TNI/Polri), 2. Jumat Bersih, 3. MABELLO (Makassar bersih lorong-lorong ta'), 4. LISA (Lihat sampah ambil), menuju MABASA (Makassar Bebas Sampah)

Namun pemberlakuan Perda dan kebijakan ini tidak efektif, permasalahan tetap muncul yaitu Makassar belum bebas dari sampah. Sampah tetap saja ditemukan di banyak lokasi, termasuk di area publik. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa tidak maksimal dibentuk oleh perda tersebut, karena tidak ada keinginan

serius untuk menegakkannya. Padahal hampir setiap tahun Pemkot Makassar meminta kuota aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR) adalah salah satu program Pemerintah Kota Makassar dalam rangka mewujudkan Kota Makassar yang bersih dan sehat. Gerakan yang dicanangkan pada 15 Juni 2014. Program ini diharapkan agar masyarakat dapat mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa dukungan masyarakat, maka program Makassar ta Tidak Rantasa (MTR) tidak akan berjalan dengan baik.

Pelaksanaan program Makassar Ta Tidak Rantasa tidak diatur dalam Peraturan daerah maupun Peraturan Walikota, hanya didasari atas Keputusan Walikota Makassar Nomor 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar.

Meskipun program Makassar Ta Tidak Rantasa (MTR) telah berjalan hampir dua tahun, namun sesungguhnya dampak program tersebut masih dirasakan minim atau belum signifikan. Sejuah ini kondisi Kota Makassar masih belum banyak berubah dari sisi kebersihan. Masih banyak ditemui sampah yang berserakan dan juga tumpukan sampah di pinggir jalan. Tong-tong sampah yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa ini pada awalnya masih lengkap dengan kantong plastik yang terpasang di pinggir jalan, kini terlihat tidak lengkap lagi. Hal ini menandakan bahwa masyarakat masih kurang kesadarannya dalam memelihara

kebersihan dan menjaga fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Walikota Makassar dalam menjalankan program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa membuat insntruksi kepada SKPD dan Kecamatan se-Kota Makassar, khususnya Dinas Pertamanan dan Kebersihan agar melaksanakan program yang mendukung Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa (MTR). Khusus untuk Lurah, mensosialisasikan gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa (MTR) kepada masyarakatnya secara dari pintu ke pintu (*Door to door*) dengan menggunakan brosur. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR) sehingga belum berdampak terhadap perubahan pola pikir masyarakat Kota Makassar.

Berdasarkan realita yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **Implementasi Program Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah dari judul ini maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar?
2. Apa yang menjadi faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Program Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar?

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat :

1. Kegunaan Akademis
 - a) Diharapkan dapat menunjang perkembangan ilmu pemerintahan khususnya mengenai *Smart City* dalam pelaksanaan program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar, juga memberikan kontribusi terhadap program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
 - b) Menambah referensi untuk dijadikan sebagai acuan pembelajaran dalam memberi informasi kepada mahasiswa.
2. Kegunaan Praktis

Pihak Pemerintah Kota Makassar dapat memanfaatkan hasil penelitian tersebut sebagai bahan informasi maupun sebagai bahan masukan dalam rangka mengambil keputusan dalam menjalankan *smart city* kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemerintah Daerah

Keberadaan Pemerintahan Daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang perlu kalian pahami, yaitu:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah

pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.

2. Pemerintah Daerah dan DPRD Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai kedudukan yang sejajar. Sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas kepala daerah/wakil kepala daerah dan perangkat daerah, sedangkan DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif di daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Pemerintahan Daerah memiliki dua tingkatan, yaitu:

- 1) Pemerintahan Daerah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur dan perangkat daerah provinsi) dan DPRD Provinsi.
- 2) Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota) dan DPRD Kabupaten/Kota.

B. Konsep Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan

Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan Kenegaraan.

Cleaves dalam Wahab (2008:187) secara tegas menyebutkan bahwa implementasi itu mencakup “proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik.” Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Mazmanian dan Sebastian dalam Wahab (2008:68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan Badan Peralihan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008:65) Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Usman, 2002:70). Sedangkan menurut Setiawan (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Grondo dalam Pasolong (2007) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavski dalam Nurdin dan Usman (2003:7) mengemukakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Friedrich dalam Wahab (2008:3) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pada implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan antara lain hambatan politik, ekonomi, lingkungan, dan kekurangan SDM. Selain itu kelemahan institusi juga merupakan hal yang sangat krusial yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan. Subarsono (2005:90) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling

berhubungan satu sama lain. Dengan adanya implementasi kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan dimulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Ripley dan Franklin dalam Tangkilisan (2003:21) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor:

1. Perspektif kepatuhan (Compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan atas mereka
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persolan.
3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Menurut Nugroho (2004:163) faktor-faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dikelola dalam tugas-tugas:

1. Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanaan. Adapun konsep-konsepnya adalah sebagai berikut:
 - a. Menyesuaikan struktur dengan strategi
 - b. Melembagakan strategi
 - c. Mengoperasionalkan strategi

- d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi
2. Pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan dengan konsep-konsepnya:
 - a. Desain organisasi dan struktur organisasi
 - b. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan
 - c. Integrasi dan koordinasi
 - d. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia
 - e. Hak, wewenang, dan kewajiban
 - f. Pendelegasian
 - g. Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia.
 - h. Budaya organisasi.
 3. Penggerakan dan Kepemimpinan yaitu melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pedoman atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*, dengan konsep-konsepnya:
 - a. Efektivitas Keopemimpinan
 - b. Motivasi
 - c. Etika
 - d. Mutu
 - e. Kerja sama tim

- f. Komunikasi Organisasi
 - g. Negoisasi.
4. Pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dengan konsep-konsepnya:
- a. Desain pengendalian
 - b. System informasi manajemen
 - c. Monitoring
 - d. Pengendalian anggaran atau keuangan
 - e. Audit

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan public tersebut. Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

C. Program Makassar Ta Tidak Rantasa

Makassar Ta Tidak Rantasa (MTR) merupakan program yang dicanangkan oleh Walikota Makassar dalam rangka meningkatkan kebersihan di Kota

Makassar. Program ini dideklarasikan oleh Walikota Makassar pada acara akbar A'bulo Sibatang Lompoa yang dilaksanakan di Gedung Celebes Convention Centre (CCC) pada tanggal 15 Juni 2014.

Kebijakan program Makassar Ta' Tidak Rantasa merupakan kebijakan yang mengatur tentang tata kebersihan kota dimulai dari kesadaran semua warga Kota Makassar yang mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, Pemerintah Kota Makassar menyadari bahwa konsep program Makassar Ta' Tidak Rantasa perlu dukungan dari masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Makassar akan selalu mensosialisasikan dan mengajak warga masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan dan mengubah kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar terhadap dinas-dinas dan Kecamatan se-Kota Makassar Nomor 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang pembagian wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR), maka program ini telah dijalankan dengan cukup baik. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan, mulai dari membersihkan kanal-kanal yang ada, membersihkan drainase disetiap sudut-sudut jalan, serta pengadaan truk sampah dengan model yang lebih canggih yang bernama Truk "Tangkasa Ki" dengan menggunakan cup penutup sehingga sampah yang diangkut baunya tidak menyebar kemana-mana.

D. Kerangka Pikir

Penanganan masalah persampahan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan berkesinambungan. Untuk itu kerjasama antara masyarakat dan

pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Maka dari itu dalam pelaksanaan Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR) dimulai dari lingkup pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Makassar sebagai contoh bagi masyarakat. Selanjutnya setelah itu aparat Pemerintah Kota Makassar akan terjun ke masyarakat untuk bekerja sama menyukseskan program Makassar Ta' Tidak Rantasa.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 10 tentang pengelolaan sampah menjelaskan tentang: (1) Pemerintah Kota menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerjajatahunan SKPD. (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. Target pengurangan sampah; b. Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA; c. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat. Namun penulis membatasi unsur-unsur yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Target pengurangan sampah, penyediaan Sarana Prasarana dan kemitraan dengan alasan bahwa unsur-unsur tersebut terlihat lebih mendukung dan memasyarakat. Unsur-unsur dari Perda Nomor 4 Tahun 2011 inilah yang penting untuk diterapkan pada program Pemerintah Kota Makassar yaitu Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR). Bila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka Program Makassar Ta' Tidak Rantasa dapat terlaksana sesuai harapan dan membantu masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada dengan efisien dan

memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau mengantisipasi kejadian tak terduga.

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah Implementasi program Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan dari bagan kerangka pikir di atas, maka akan diuraikan deskripsi fokus sebagai berikut:

1. Implementasi program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar yaitu penerapan unsur-unsur Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah dalam program Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
2. Program Pengurangan Sampah yaitu program-program yang mendukung terlaksananya Program Makassar Tidak Rantasa di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
3. Sarana Prasarana yaitu fasilitas yang digunakan berupa sarana transportasi maupun sarana pengelolaan sampah dalam pelaksanaan program Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
4. Kemitraan yaitu Keterlibatan atau kerjasama Pemerintah dan Pihak Swasata dalam program Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
5. Terlaksananya program Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR) adalah hasil yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Makassar khususnya Kecamatan Rappocini
6. Faktor Pendukung adalah faktor yang menjadi pendukung dari program Makassar Tidak Rantasa di Kecamatan Rappocini yang terdiri dari Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan sarana prasarana yang memadai

7. Faktor penghambat adalah faktor yang menjadi penghambat dari program Makassarta Tidak Rantasa di Kecamatan Rappocini yang terdiri Program Makassarta Tidak ada batasan waktu, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah diadakannya seminar proposal dan waktu yang dibutuhkan untuk meneliti kurang lebih tiga bulan. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Alasan memilih lokasi karena Kecamatan Rappocini adalah salah satu Kecamatan dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang menjalankan program Makassar Ta' Tidak Rantasa dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Selanjutnya Sugiyono (2011:11) berpendapat bahwa pada penelitian kualitatif, teori diartikan sebagai paradigma. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Dalam hal ini adalah masalah-masalah yang ditemukan pada program Makassar Ta' Tidak Rantasa di Kota Makassar.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara umum tentang fakta yang berhubungan dengan hal yang ingin diteliti, dalam hal ini adalah unsur-unsur Smart City dalam program Makassar Ta' Tidak Rantasa. Hal tersebut dilakukan dengan memahami gejala-gejala yang diteliti serta menganalisa apa yang didengar, mempelajari proses penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut berdasarkan konteks ruang dan waktu serta situasi secara alami.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan pengamatan (observasi), wawancara maupun dokumentasi dari informan-informan yang terkait dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung penulisan pada penelitian ini melalui dokumen atau catatan yang ada serta tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, literatur-literatur, arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer yang senantiasa berkaitan dengan masalah.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang ada pada lokasi penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebiasaan yang menjadi latar penelitian setempat. Berikut daftar nama informan penelitian:

Tabel I Daftar Nama Informan

No	Nama	Jabatan	Inisial	Jumlah
1	Husain, S.Sos	Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini	HS	1 Orang
2	Fitri Yulianti,S	Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini	FY	1 Orang
3	Aswad Fitrah	Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini	AF	1 Orang
4	Fahry Jamal	Ketua RW 05 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini	FJ	1 Orang
5	Nur Hayati	Warga Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini	NH	1 Orang
6	Muhammad Ali	Warga Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini	MA	1 Orang
7	Suharman	Pengelola Bank Sampah Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini	SH	1 Orang
8	St.Aisyah	Warga Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini	SA	1 Orang
9	Muh. Darwis	Ketua RT 02 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini	MD	1 Orang
10	Muh. Ramli	Pengelola Bank Sampah Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini	MR	1 Orang
		Total Jumlah Informan		10 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini melalui :

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan diselidiki. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung. Pelaksanaan program Makassar Ta' Tidak Rantasa di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Rappocini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi dari interviewee. *Interviewee* pada penelitian kualitatif adalah informan yang daripadanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya terkait program Makassar Ta Tidak Rantasa

F. Teknik Analisis Data

Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Analisa data dilakukan melalui tiga alur, yakni:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian data dari catatan lapangan (*Field note*). Proses ini berlangsung sepanjang penelitian yang dilakukan sekitar sebulan, dimulai dengan membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian ini selesai ditulis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sampai kesimpulan akhir didapatkan.

2. Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan peneliti dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis mencoba lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya tentunya akan banyak membantu. Sajian data meliputi deskripsi, matriks, gambar/skema, dan tabel yang diperoleh dari berbagai instansi dimana penelitian ini berlangsung. Kesemuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada awal pengumpulan data, peneliti sudah mencoba memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai

proposisi. Hal itu diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2009:366), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2009:368) ada tiga macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangannya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat Narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Lokasi Penelitian

Kecamatan Rappocini merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar, pemekaran dari Kecamatan Tamalate yang dibentuk pada hari rabu tanggal 7 Januari 1998 tindak lanjut dari persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/1242/PUOD tanggal 03 Mei 1996 berdasarkan Gubernur Sulawesi Selatan 538/VI/1996 Tahun 1996 Tanggal 27 Juni 1996, dengan luas wilayah 9,23 Km yang berbatasan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Manggala dan Kabupaten Gowa
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Tamalate

Kecamatan Rappocini merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian antara permukaan laut, terdiri dari 10 Kelurahan menurut jaraknya layak masing-masing Kelurahan ke Kecamatan berkisar 1 Km sampai dengan jarak 5-10 Km dengan jumlah penduduk 193.389 Jiwa.

B. Implementasi Program Makassar Ta Tidak Rantasa di Kecamatan Rappocini

Makassar Ta Tidak Rantasa merupakan sebuah gerakan yang digagas oleh Walikota dan Wakil Walikota Makassar sebagai ruang, tempat dan wadah bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kota Makassar lebih baik dan lebih maju. Pengertian Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa ini memiliki cakupan yang

sangat luas, tidak hanya masalah sampah akan tetapi dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kota Makassar harus berperilaku bersih. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappociniyang menjelaskan bahwa:

“Program Makassar Tidak Rantasa merupakan sebuah wadah bagi masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan Kota Makassar lebih baik bahkan 2 kali lebih baik. Wujud dari Makassar Tidak Rantasa itu luas bukan cuma masalah kebersihan tapi sebagai sebuah gerakan mencakup semua layanan, yaitu layanan yang menjadi harapan masyarakat”(Wawancara AF, Tanggal 23 Maret 2017)

Hasil wawancara dengan Bapak AF dapat dianalisa bahwa Program Makassar Tidak Rantasa perwujudannya bukan Cuma masalah kebersihan tapi sebagai sebuah gerakan layanan harapan masyarakat. Program Makassar Tidak Rantasa bukan hanya masalah sampah tetapi segala hal yang menyangkut kehidupan sehari hari. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini sebagai berikut:

“Program Makassar tidak rantasa luas cakupannya mulai dari kebersihan, kesadaran lingkungan kehidupan sosial juga tidak bisa rantasa. Seperti contohnya ada anak pemuda yang kita ketahui di lingkungan ini anak mudanya banyak yang putus sekolah, otomatis dari segi Makassar Tidak rantasa kita lihat hidupnya rantasa, tidak ada kegiatannya dan menganggur.”(Wawancara YF, Tanggal 23 Maret 2017)

Hasil wawancara dengan YF menyatakan bahwa Program Makassar tidak Rantasa luas cakupannya mulai dari kebersihan, kesadaran lingkungan kehidupan sosial juga tidak bisa rantasa. Program Makassar Tidak Rantasa juga sangat membantu Pemerintah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kec.Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Program Makassarta Tidak Rantasa sangat membantu Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, baik terhadap tingkah laku seseorang maupun kegotong royongan serta merubah pola hidup bersih masyarakat.”(Wawancara HS, Tanggal 23 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HS, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Program Makassarta Tidak Rantasa membantu pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan sikap kegotong royongan serta merubah pola pikir masyarakat untuk hidup bersih. Program ini diharapkan bisa merubah pola pikir masyarakat yang dulunya sering membuang sampah sembarang tempat dapat berubah menjadi hidup bersih dan lingkungan Kota dapat terbebas dari masalah persampahan. Guna menunjang suksesnya program Makassarta Tidak Rantasa, maka penulis menggunakan indikator yakni Program Pengurangan Sampah, Sarana Prasarana, dan Kemitraan yang akan dipaparkan satu persatu di bawah ini:

1. Program Pengurangan Sampah

Efektivitas pelaksanaan program Makassarta Tidak Rantasa dapat dinilai dari pencapaian sasaran atau tujuan dari program ini. Apabila tujuan dari pelaksanaan program ini telah dicapai sebelum batas waktu yang ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut berjalan efektif. Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan capaian tujuan program Makassarta Tidak Rantasa di Kecamatan Rappocini dapat ditinjau dari kegiatan program sebagai berikut:

a. Lorong Garden (LONGGAR)

Lorong Garden adalah sebuah program Pemerintah Kota Makassar, yang inisiatifnya dari masyarakat tetapi dikembangkan Pemkot setempat. Program ini

selain dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi lorong-lorong di Kota Makassar. Lorong yang biasanya kumuh dan sering menjadi sumber penyakit sosial, ingin diubah menjadi lorong yang asri, sejuk, indah, bahkan ditargetkan menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat. Prioritas pembangunan untuk tahun 2018 Kecamatan Rappocini memfokuskan untuk infrastruktur. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk prioritas Tahun 2018, Kecamatan Rappocini akan berfokus pada Infrastruktur, Transportasi, drainase wilayah-wilayah penghubung dan program-program unggulan seperti Lorong Garden dan Bulo pada 10 Kelurahan yang ada di Kecamatan Rappocini.” (Wawancara HS, Tanggal 23 Maret 2017)

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak HS dapat diketahui bahwa salah satu prioritas pembangunan Kecamatan Rappocini adalah program-program unggulan Makassar Tidak Rantasa yaitu Longgar (Lorong Garden) dan Bulo pada 10 Kelurahan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Antusias masyarakat menyikapi program Lorong Garden dan Bulo terlihat pada warga Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saat beramai-ramai menata lorong di sekitar rumahnya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik dan itulah yang diperlihatkan puluhan warga lainnya ketika mereka berswadaya mewujudkan lorong garden atau lorong yang digagas dengan pola "kebun" keluarga. Pembenahan Lorong ini barulah terwujud ketika Lurah Bonto Makkio terjun langsung mengarahkan warga Kelurahan Bonto Makkio, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga Kelurahan Bonto Makio Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sebenarnya Sudah lama Pak Camat mengarahkan kami untuk membenahi lorong ini agar dapat bersaing dengan lorong garden lainnya, namun baru kali ini bisa terwujud setelah Pak Lurah turun langsung bersama warga membenahi lorong kami,”(Wawancara SA, Tanggal 26 Maret 2017)

Hasil wawancara dengan ibu SA menunjukkan bahwa warga Kelurahan Bonto Makkio menjadi lebih bersemangat membenahi lorong untuk dijadikan lorong garden dengan kehadiran Pak Lurah bersama para warga dalam membenahi lorong menjadi lebih tertata rapi dan terlihat lebih asri. Menanggapi antusias warga dan Lurah Bonto Makkio yang bersama-sama membenahi lorong yang akan dijadikan lorong garden, salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan& Pertamanan Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya memberikan tanggapan sebagai berikut:

"Lurah Bonto Makkio memang sosok yang peramah dan mudah beradaptasi dengan warga, meskipun sumbangsihnya tidak seberapa untuk program ini, namun berkat pendekatan yang dilakukan mampu membangkitkan semangat warga Kelurahan Bonto Makkio untuk berswadaya dan bersatu padu membentuk Lorong Garden.”(Wawancara AF, Tanggal 27 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AF dapat disimpulkan bahwa pendekatan dari Pak Lurah Bonto Makkio yang peramah dan mudah beradaptasi mampu membangkitkan semangat warga Kelurahan Bonto Makkio dalam membentuk lorong garden.

Berkat kerjasama Lurah dan warga Kelurahan Bonto Makkio, Lorong berpaving blok sepanjang 100 meter di lokasi itu terlihat sangat bersih, benda-benda yang merusak pemandangan telah disingkirkan, sisi tepi kiri dan kanan lorong dicat dengan warna hijau muda.Pot tanaman terbuat dari galon bekas atau kemasan plastik. Partisipasi seperti ini sangat diharapkan agar program penataan

lingkungan perkotaan yang dicanangkan khususnya program Lorong Garden dapat berjalan baik dan itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah Kecamatan dan Kelurahan saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama dengan warga. Lorong garden juga memberikan banyak manfaat bagi warga, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga Kelurahan Bonto Makkio dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Program Lorong garden sangat bermanfaat bagi Kami, selain mewujudkan lingkungan yang asri, hijau dan bersih, kami juga akan memperoleh manfaat dari tanaman produktif yang kami tanam berupa tanaman pangan, seperti cabe dan aneka sayuran, obat-obatan serta tanaman hias. Kekompakan seluruh warga membangun lorong garden ini juga menjadi wadah bagi Kami untuk bersilaturahmi.” (Wawancara SA, Tanggal 26 Maret 2017)

Hasil wawancara dengan Ibu SA menunjukkan bahwa Program Lorong Garden memberikan manfaat bagi masyarakat, selain terwujudnya lingkungan yang asri, hijau dan bersih, masyarakat juga memperoleh manfaat dari tanaman pangan, obat-obatan dan tanaman hias yang mereka tanam dan kekompakan masyarakat dalam mewujudkan Lorong Garden menjadi wadah mereka bersilaturahmi. Lorong Garden terbentuk berkat kerjasama warga masyarakat dan Pemerintah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak MD selaku Ketua RT 02/RW 06 Kelurahan Bonto Makkio dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Lorong ini diubah oleh warga dimulai dengan melakukan kegiatan bersih-bersih lorong, melakukan penataan lingkungan, hingga menghijaukan lorong dengan berbagai tanaman. Warga kita yang berinisiatif, Pemerintah hanya membantu dan menyiapkan beberapa kebutuhan kita, Misalnya, warga yang menyediakan pot tanaman, membersihkan lingkungan, menanam, hingga menjaganya. Sementara pemerintah membantu menyediakan mesin untuk mengolah sampah menjadi pupuk. Warga sangat senang dengan kondisi lorong yang berubah menjadi bersih, sejuk, dan banyak tanaman. Ada warga yang menanam cabe, timun, selada, sawi, terong, dan lain-lain. Ada yang ditanam langsung di tanah kosong, tapi

sebagian besar ditanam di dalam pot.”(Wawancara MD, Tanggal 27 Maret 2017)

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak MD, dapat diketahui bahwa suksesnya wujud Lorong Garden berkat kerjasama masyarakat dan Pemerintah, warga yang mempunyai inisiatif untuk menanam bahan pangan maupun tanaman hias, Pemerintah yang menyiapkan kebutuhan masyarakat misalnya pot tanaman, bibit cabe, mesin pengolah sampah menjadi pupuk.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan beberapa informan, maka penulis menyimpulkan bahwa Program Lorong Garden dapat dikatakan efektif dengan tingkat keberhasilan 100% karena masyarakat terlihat sangat antusias membenahi Lorong untuk dijadikan Lorong Garden. Masyarakat dapat merasakan manfaat program Lorong Garden, selain dapat menikmati lingkungan yang hijau, asri, dan bersih, masyarakat juga merasakan manfaat dari penanaman bahan pangan, seperti cabe, aneka sayuran, dan obat-obatan.

Program Longgar ini merupakan program yang memanfaatkan lorong-lorong kota agar lebih produktif. Lorong yang ada ditata agar lebih indah, bersih dan hijau dengan tanaman sayur, tomat, cabai dan lainnya. Masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman yang dapat bernilai ekonomis atau dapat dikonsumsi sehari-hari. Untuk menunjang program tersebut, pemerintah berupaya membentuk Badan Usaha Lorong yang nantinya tanaman hasil dari lorong garden tersebut dapat dijual di badan usaha tersebut.

b. Kerja Bakti

Guna mencapai tujuan perubahan pola pikir masyarakat untuk selalu hidup bersih dan sehat, maka pemerintah Kecamatan Rappocini membuat jadwal kerja

bakti yang bertujuan untuk membiasakan masyarakat membersihkan lingkungan kerja, rumah dan lingkungan sekitarnya. Dalam pelaksanaan kerja bakti tersebut diharapkan agar segala elemen kota makassar dapat berperan aktif baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Secara konseptual, pelaksanaan kerja bakti tersebut dibagi menjadi 3 hari yaitu jumat bersih, sabtu bersih dan minggu bersih. Semua elemen wajib berperan aktif dalam pelaksanaan kerja bakti tersebut baik pemerintah, karyawan swasta maupun masyarakat membersihkan di lingkungan sekitar. Yang pertama jumat bersih itu ditujukan untuk pegawai pemerintahan maupun karyawan swasta mengadakan kerja bakti di wilayah tempat berkerja masing-masing, sabtu bersih ditujukan kepada sekolah-sekolah baik murid, dan guru untuk membersihkan sekolah masing-masing. Selanjutnya untuk minggu bersih ditujukan kepada semua masyarakat baik yang berstatus pegawai atau karyawan swasta saat berada di rumah dia kembali menjadi masyarakat dan wajib untuk turun kerja bakti membersihkan lingkungan rumah atau lorong-lorong rumah.

Pihak Kecamatan Rappocini menjadwalkan rutinitas kegiatan kerja bakti setiap hari Jum'at. Kerja bakti pada hari minggu diadakan di wilayah masing-masing RW tiap Kelurahan, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Setiap hari Jumat memang diadakan kerja bakti atau pembersihan di wilayah sekitar kantor Kecamatan Rappocini, karena hal tersebut telah diagendakan dari dahulu. Rutin kita adakan kerja bakti dengan mengajak Staff, warga dan satgas. Namun jika pada hari Minggu kerja bakti dilaksanakan di wilayah masing-masing RW tiap kelurahan, kerja bakti ini

sangat baik dan selalu jadi perhatian oleh warga setempat. “(Wawancara FY, Tanggal 23 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu FY dapat diketahui bahwa kerja bakti pada hari Jumat memang rutin dilaksanakan di Kantor Kecamatan Rappocini dan sudah menjadi agenda rutin sejak dahulu. Demikian pula kerja bakti yang dilaksanakan pada hari minggu di Tiap-tiap Kelurahan di Kecamatan Rappocini. Selain melaksanakan kerja bakti di Kantor Kecamatan maupun di Kelurahan-Kelurahan, Tim Kebersihan Kecamatan Rappocini bersama Satgas Kelurahan dan masyarakat tiap pagi membersihkan mesjid di lingkup wilayah Kecamatan Rappocini, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Tim kebersihan kami kerja bakti setiap hari di waktu pagi, di mesjid lingkup wilayah Kecamatan Rappocini. Jadi setiap hari kami melaksanakan kerja bakti membersihkan 1 mesjid, kerja bakti tersebut merupakan bentuk pengabdian dari masyarakat Kota Makassar untu mendukung program Makassar Tidak Rantasa (MTR) agar Makassar menjadi dua kali tambah baik. Kegiatan seperti ini mendukung program Pemkot Makassar.”(Wawancara AF, Tanggal 23 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AF, maka dapat disimpulkan bahwa Tim kebersihan Kecamatan Rappocini melaksanakan kerja bakti setiap hari di waktu pagi membersihkan 1 mesjid, kerja bakti tersebut merupakan bentuk pengabdian dari masyarakat Kota Makassar untuk mendukung program Makassar Tidak Rantasa (MTR) agar Makassar menjadi dua kali tambah baik. Kegiatan seperti ini mendukung program Pemkot Makassar.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas maka keberhasilan program Kerja Bakti dapat dikatakan mencapai 95%, karena dengan

diagendakannya program kerja bakti yang dilaksanakan pada hari jumat maupun hari Minggu di Kecamatan Rappocini, seluruh masyarakat di Kecamatan Rappocini sangat antusias menjaga kebersihan lingkungan.

c. Sosialisasi Program Makassar Ta Tidak Rantasa (MTR)

Gerakan Makassar Ta tidak rantasa yang telah di canangkan oleh pemerintah Kota Makassar tentu harus disosialisasikan. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengenal dan memahami apa yang dimaksud dengan Makassar Ta Tidak Rantasa dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terkait jadwal sosialisasi program Makassar Ta Tidak Rantasa, Tiap tahun diadakan di Kantor Kecamatan Rappocini, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sosialisasi program Makassar Ta Tidak Rantasa diadakan tiap tahun sekali di Kantor Kecamatan Rappocini. Pada bulan february 2017 kemarin diadakan sosialisasi daur ulang sampah di Aula Kantor Kecamatan Rappocini yang terletak di Jalan Teduh Bersinar. Kegiatan yang digelar ini dihadiri oleh masing-masing utusan kelurahan lingkup Rappocini yang berjumlah 11 kelurahan.”(Wawancara HS, Tanggal 23 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HS dapat disimpulkan bahwa tiap tahun sekali diadakan sosialisasi terkait program Makassar Ta Tidak Rantasa di Aula kantor Kecamatan Rappocini yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari 11 Kelurahan. Sosialisasi yang diadakan bulan Februari kemarin mengangkat tema pemilihan sampah organik, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang

Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Bapak Camat Rappocini Hamri Haiya mengapresiasi sosialisasi tersebut dan berharap bisa memaksimalkan pemilhan sampah yang masih bisa digunakan. Dengan sosialisasi itu di harapkan makin banyak masyarakat yang melakukan pemilhan sampah, Dalam hal ini sampah organik yang masih sangat kurang pemanfaatannya, padahal bisa di manfaatkan jadi pupuk. Seperti sampah-sampah organik bisa dijadikan pupuk untuk tanaman, terutama untuk tanaman yang berada di Longgar dan Bulu.” (Wawancara FY, Tanggal 23 Maret 2017)

Sesuai hasil wawancara dengan ibu FY dapat disimpulkan bahwa Kepala Kecamatan Rappocini memberikan apresiasi sosialisasi tersebut dan berharap bisa memaksimalkan pemilhan sampah yang masih bisa digunakan. Dengan sosialisasi itu di harapkan makin banyak masyarakat yang melakukan pemilhan sampah. Proses sosialisasi merupakan segala proses yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam memperkenalkan program Makassarta Tidak Rantasa, baik dalam bentuk formal maupun non formal yang dijelaskan oleh salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Banyak hal yang dilakukan dalam menyukseskan program Makassarta Tidak Rantasa. Kami dari pihak kecamatan di setiap pertemuan baik formal dan nonformal tidak henti-hentinya memberikan informasi kepada tokoh masyarakat, utamanya RT/RW. ini karena mereka adalah perpanjangan kami dari pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Tidak usah dulu muluk-muluk tentang Makassarta Tidak Rantasa, cukup dulu itu bagaimana masyarakat bisa merubah pola pikirnya bahwa kebersihan itu adalah kebutuhan, dan bagaimana mentaati perturan tentang jadwal pembuangan sampah. Kalau itu sudah terwujud Insha Allah yang namanya kebersihan itu akan terwujud.” (Wawancara AF, Tanggal 23 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AF, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Rappocini gencar mengadakan sosialisasi program Makassarta Tidak Rantasa, baik secara formal maupun tidak formal melalui tokoh-tokoh masyarakat, seperti RW maupun RT untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Sosialisasi program Makassarta Tidak Rantasa tidak perlu melihat waktu dan tempat, dimanapun sosialisasi itu bisa dilaksanakan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak FJ selaku Ketua RW 05 Kel.Cng.Sari Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sosialisasi Program Makassarta Tidak Rantasa, bukan berapa banyak tapi tiap kita ketemu kita sosialisasikan. Tiap masuk di masjid itu kita himbaukan. Itukan sosialisasi dimana-mana harus kita sosialisasikan tidak mengenal ruang dan tempat. Sepanjang ada waktu dan kesempatan, kita sosialisasikan. Setiap ada kegiatan kecamatan kita sosialisasikan walupun sekarang memang tidak ada kegiatan khusus, tapi setiap ada ketemu masyarakat kita sisipkan.” (Wawancara FJ, Tanggal 26 Maret 2017)

Berdasarkan penjelasan dari Bapak FJ di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi dari Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa dilakukan didalam kegiatan formal maupun tidak formal. Jadi disetiap pertemuan resmi ataupun dalam saat kerja bakti dan bertemu masyarakat pemerintah kecamatan terus menerus berupaya untuk mensosialisasikan Program Makassarta Tidak Rantasasebelumnya. Maka untuk menilai efektivitas, maka langkah-langkah pemerintah dalam dua sisi yaitu pertama sisi nonformal yang merupakan pelaksanaan kegiatan yang tidak terikat terhadap aktor pelaksana yaitu melalui jargon dan kedua sisi formal yaitu pelibatan elemen-elemen pendukung yang memiliki hirarki. Dari sisi non formal digunakan istilah-istilah program yang

ditulis pada spanduk maupun pada dinding, seperti yang diungkapkan oleh Bapak MD selaku Ketua RT 02 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Dari sisi nonformal dalam pengaplikasiannya maka digunakan spanduk yang bertuliskan LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), MABASA (Makassar Bebas Sampah) serta Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa. Spanduk ini banyak kita lihat di dinding-dinding yang ada di Kota Makassar. Spanduk-spanduk ini juga merupakan bentuk sosialisasi tidak langsung terhadap Gemar Makassar Tidak Rantasa, karena ini merupakan jargon yang dibuat dalam menyukseskan Gemar Makassar Tidak Rantasa.”(Wawancara MD, Tanggal 26 Maret 2017).

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menilai bahwa tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program Makassar Ta' Tidak Rantasa masih mencapai 75% atau dapat dikatakan belum efektif karena Pemerintah Kecamatan Rappocini mengadakan sosialisasi setahun sekali, Seharusnya Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW lebih aktif lagi mensosialisasikan Gerakan Makassar Tidak Rantasa langsung ke rumah-rumah warga. Tidak hanya pada pertemuan formal atau diumumkan di masjid-masjid. Selain itu penyebaran brosur sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat memahami manfaat dari MTR. Selain itu penggunaan jargon juga belum secara maksimal merubah pola pikir masyarakat.

d. Sampah Tukar Beras

Program tukar sampah dengan beras yang digaungkan Bapak Walikota Moh. Ramdhan Pomanto bersama Bapak Wakil Walikota Syamsul Rizal ketika berkampanye memperebutkan kursi Wali Kota Makassar beberapa tahun lalu, kini mulai direalisasikan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Program Sampah

Tukar Beras Program Tukar Sampah dengan Beras ini dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pertamanan dan Kebersihan. Penukarannya dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bank Sampah Pusat Makassar. Lokasinya mudah dijangkau karena berada di dekat Pasar Toddopuli di Panakkukang. Program Makassar Tidak Rantasa akan berkesinambungan dengan penukaran sampah dengan beras, tapi masyarakat harus diberi pemahaman terlebih dahulu kategori sampah yang bisa ditukar dengan beras, sesuai keterangan dari salah seorang pengelola Bank Sampah di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam wawancaranya sebagai berikut:

Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) merupakan program yang dititik beratkan pada penanaman perubahan pola pikir dan tingkah laku dalam masyarakat untuk menciptakan kebersihan. Selain itu, program ini juga akan berkesinambungan dengan program penukaran sampah dengan beras yang tidak akan langsung direalisasikan karena masyarakat harus paham dulu kategori sampah apa yang akan ditukarkan dengan beras. (Wawancara SH, Tanggal 26 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SH, dapat disimpulkan bahwa Program Makassar Tidak rantasa memang mengadakan program penukaran sampah dengan beras, namun tidak langsung direalisasikan karena masyarakat harus paham dulu kategori sampah yang seperti apa yang bisa ditukar dengan beras. Untuk itu program ini perlu menitik beratkan pada pemahaman masyarakat terlebih dahulu bagaimana menciptakan kebersihan. Program ini tidak hanya memberi peluang baru bagi warga untuk mendapatkan beras secara gratis, tetapi di sisi lain, upaya tersebut akan membantu mengurangi volume sampah yang terbuang setiap hari. Sekaligus membiasakan masyarakat menjaga kebersihan sebagai bagian dari program Makassar Tidak Rantasa. Namun masyarakat yang

sudah memahami kategori sampah seperti apa yang dapat ditukarkan dengan beras tentunya akan sangat senang dengan program ini, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang Warga kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Saya sangat bersyukur karena sampah yang selama ini jadi masalah justru bisa disulap jadi beras yang bisa membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Awalnya saya tidak percaya sampah bisa ditukar dengan beras. Tetapi terbukti saya bisa dapat beras gratis hanya dengan menukarnya dengan sampah,” (Wawancara SA, Tanggal 26 Maret 2017)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu SA, dapat disimpulkan bahwa

masyarakat yang memahami sampah seperti apa yang bisa ditukar dengan beras tentu akan merasa senang karena hanya dengan mengumpulkan sampah tertentu, mereka bisa menukarnya dengan beras yang menjadi bahan makanan pokok mereka. Namun tidak semua masyarakat senang dengan program menukarkan sampah tertentu dengan beras, ada juga masyarakat yang lebih senang menukarkan sampah mereka dengan uang, karena dengan uang mereka dapat membeli kebutuhan rumah tangga yang lain selain dari beras. terkait hal tersebut, salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Dengan beroperasinya Bank Sampah ini maka masyarakat bisa menukarkan sampah non-organik menjadi beras, namun masih banyak masyarakat di Kecamatan Rappocini yang tidak antusias merespon penukaran sampah dengan beras, mereka lebih suka menukar dalam bentuk uang, karena dengan uang mereka bisa membeli kebutuhan rumah tangga lainnya.” (Wawancara HS, Tanggal 23 Maret 2017)

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak HS, dapat disimpulkan bahwa meskipun program Makassarta Tidak Rantasa memiliki program penukaran sampah non organik dengan beras, namun tidak semua masyarakat tertarik untuk

mendapatkan beras, masih ada masyarakat yang lebih tertarik menukarkan sampah mereka dengan uang. Berdasarkan pemaparan di atas, tingkat keberhasilan program tukar beras dengan sampah ini belum mencapai 100% atau hanya mencapai sekitar 75% karena tidak semua masyarakat di Kecamatan Rappocini antusias dalam merespon program tersebut. Masih banyak masyarakat yang lebih memilih menukar sampah mereka dengan uang daripada menukar dengan beras.

2. Sarana Prasarana

a. Truk Tangkasaki

Di Kota Makassar, pengangkutan sampah tak hanya dilakukan oleh truk, tapi mobil boks. Nama mobil boks itu Tangkasaki, kependekan dari Truk Angkutan Sampah Kita. Dalam bahasa Makassar, Tangkasaki berarti Bersihkan. Mobil itu diberi nama Tangkasaki (Truk Angkutan Sampah Kita) dan didesain langsung oleh Walikota Makassar Drs. Danny Pomanto. Desain mobil Tangkasaki cukup elegan dengan warna menyala. Cukup bersahabat jika dilihat. Mobil ini memilih desain dengan bak tertutup maka tidak ada lagi sampah tumpah dan berserakan saat pengangkutan dengan daya muat lebih besar dari pengangkut sampah biasa. Truk Tangkasaki juga dilengkapi dengan *Rotater* dan Global Positioning System (GPS), sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kelengkapan Mobil Truk Tangkasaki ini dilengkapi dengan *Rotater* dan *Global Positioning System* (GPS) jadi mobil ini bisa dikontrol operasionalnya. Ini untuk mendukung kinerja dengan konsep *Smart City*, selain memiliki bak yang lebih besar, juga dilengkapi dengan *Jet Pump*

sehingga bisa langsung dibersihkan usai digunakan.”(Wawancara HS, Tanggal 23 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HS dapat diketahui bahwa keunggulan dari mobil truk Tangkasaki adalah dilengkapi dengan Rotater dan Global Positioning System (GPS) sehingga Truk Tangkasaki tersebut bisa dikontrol saat dioperasikan, truk Tangkasaki juga dilengkapi dengan Jet Pump. Mobil Truk Tangkasaki ini memiliki banyak keunggulan sehingga lebih efektif dan efisien saat dioperasikan, seperti yang dijelaskan oleh salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Keunggulan lain dari Truk Tangkasaki ini adalah bak yang tertutup, sehingga pengguna jalan tidak lagi terganggu dengan aroma tidak sedap saat pengangkutan. Bahan yang terbuat dari aluminium juga agar tidak mudah keropos serta mempunyai sirine dan alat pemutar musik. Mobil ini juga bisa untuk emergency dan evakuasi serta memiliki lampu sorot. Kalau ada banjir bisa juga sebagai tempat logistik, orang juga bisa masuk ke dalam untuk evakuasi.” (Wawancara AF, Tanggal 23 Maret 2017)

Hasil wawancara dengan Bapak AF dapat disimpulkan bahwa Truk Tangkasaki memiliki banyak keunggulan diantaranya adalah memiliki bak tertutup tidak mudah keropos karena terbuat dari aluminium, mempunyai sirine/pemutar musik, dapat digunakan untuk *emergency* dan evakuasi serta memiliki lampu sorot. Dengan keunggulan yang dimiliki Truk Tangkasaki, dianggap lebih banyak manfaatnya dibanding mobil Truk pengangkut sampah model lama, sebagaimana yang dipaparkan oleh salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Beberapa keunggulan juga dimiliki mobil Tangkasaki dibandingkan mobil sampah model lama. Pertama, baknya tertutup. Kedua, muatannya lebih banyak. Satu kali lipat lebih banyak dibandingkan mobil lama. Kalau mobil lama cuma bisa mengangkut sebanyak 3 kubik, mobil Truk Tangkasaki bisa mengangkut sampai 6 kubik. Ketiga, anti keropos. Bak mobil lama banyak yang keropos karena termakan sampah yang banyak mengandung asam. Bak mobil Tangkasaki yang terbuat dari aluminium diharapkan tidak mudah keropos.” (Wawancara FY, Tanggal 23 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu FY dapat diketahui bahwa Beberapa keunggulan juga dimiliki mobil Tangkasaki dibandingkan mobil sampah lama. Yaitu baknya yang tertutup, muatannya lebih banyak dan anti keropos. Bak mobil pengangkut sampah model lama banyak yang keropos karena termakan sampah yang banyak mengandung asam. Bak mobil Tangkasaki terbuat dari aluminium. Masyarakat lebih senang dengan digunakannya Truk Tangkasaki ini sebagai transportasi pengangkut sampah di Kecamatan Rappocini dibandingkan dengan Truk pengangkut model lama, seperti yang dipaparkan oleh salah seorang warga Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Dibandingkan mobil-mobil pengangkut sampah model lama, Truk Tangkasaki ini lebih bagus, dengan model bak yang tertutup tentunya sampah pun tak akan berjatuh ke mana-mana saat diangkut. Begitu pula dengan baunya, tidak menyebar.” (Wawancara NH, Tanggal 23 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara Ibu NH didapatkan keterangan bahwa Truk Tangkasaki ini lebih disukai oleh masyarakat karena mobil ini memiliki bak yang tertutup sehingga tidak menimbulkan aroma sampah yang menyengat. Pengangkutan sampah di semua wilayah Kecamatan Rappocini seharusnya bisa lebih luas dan rutin. Setiap kecamatan mendapat tiga armada

mobil pengangkut sampah bernama Tangkasaki yaitu Armada Tiga Roda (Fukuda), Truk Tangkasaki, dan Dum Truk. Jadi, pengangkutan sampah tidak hanya bergantung pada armada milik Dinas Pertamanan dan Kebersihan serta beberapa unit armada pengangkut berukuran kecil di beberapa Kelurahan. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Di Kecamatan Rappocini untuk armada pengangkutan sampah tersedia sebanyak 13 unit armada Tangkasaki (mobil bak tertutup) dibantu 12 unit Dum truk, 50 unit Roda Tiga Pemkot, 16 unit Roda Tiga Mandiri, 1 unit Roda Tiga BKM, 28 unit Roda Tiga Swasta, 21 unit Gerobak Becak yang menjangkau wilayah Rappocini seluas 9,2 kilo meter persegi. Melalui sistem ini, jadwal pembuangan sampah diatur dari proses pengumpulan sampah warga sampai ke kontainer dan proses ini bisa berjalan tertib dan hasilnya memuaskan”. (Wawancara AF, Tanggal 23 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara Bapak AF dapat diketahui bahwa armada pengangkutan sampah yang tersedia sebanyak 13 unit Truk Tangkasaki, dibantu dengan 311 unit transportasi angkutan sampah lainnya. Penanganan sampah di Kecamatan Rappocini progresnya sangat baik setelah armada truk Tangkasaki siap. Namun kelemahan dari truk Tangkasaki ini pada saat bongkar muat sampah menggunakan waktu yang cenderung lama dibandingkan dengan truk sampah biasa pada umumnya. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang warga Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini yang bertugas sebagai sopir dari truk Tangkasaki dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Jika dibandingkan dengan truk sampah biasa hanya perlu 1 kali tongkang untuk menumpahkan seluruh isi sampahnya, lain halnya dengan truk Tangkasaki. Selain ditongkang, sampah di dalam truk Tangkasaki juga harus disekop secara manual untuk mengosongkan isi sampahnya. Hal tersebut yang membuat bongkar muat truk sampah Tangkasaki

membutuhkan waktu yang lama. Biasanya dibutuhkan dua orang kernet lagi untuk membantu menyekop sampah,”(Wawancara MA, Tanggal 26 Maret 2017)

Hasil wawancara dengan Bapak MA menjelaskan bahwa Truk Tangkasaki memiliki kelemahan yaitu sampah dalam Truk Tangkasaki meskipun telah ditongkang namun harus disekop secara manual untuk mengeluarkan sampah dari dalam mobil. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu dan tenaga tambahan. Selain mengeluhkan tentang proses pembuangan sampah yang membutuhkan waktu yang lama, petugas atau sopir dari truk Tangkasaki juga mengeluhkan tentang biaya yang mereka keluarkan jika harus menunggu atau antri berhari-hari hanya untuk menurunkan sampah dari Truk Tangkasaki. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang warga Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini yang juga bertugas sebagai Sopir truk Tangkasaki dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Ketika Truk Tangkasaki yang kami bawa itu harus menunggu atau antri, tentunya kami juga harus mengeluarkan uang lebih banyak jika harus antri berhari-hari. Kalau uang limaribu rupiah tidak cukup untuk satu hari. Selama menunggu kita harus mengeluarkan uang untuk makan, rokok, dan kopi. Biasa sampai dua hari kita menunggu. Kita capek menunggu, bukan capek kerjanya,” (Wawancara MA, Tanggal 26 Maret 2017)

Hasil wawancara dengan Bapak MA menunjukkan bahwa akibat dari kelemahan Truk Tangkasaki seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh informan akhirnya menimbulkan dampak bagi informan yang bertugas sebagai sopir dari Truk Tangkasaki dari segi waktu dan biaya.

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian di atas dapat dikatakan memiliki tingkat keberhasilan sebesar 75% karena Truk Tangkasaki di Kecamatan Rappocini memiliki banyak manfaat dan keunggulan dibandingkan transportasi pengangkut sampah sebelumnya. Diantaranya Truk Tangkasaki memiliki bak

tertutup tidak mudah keropos karena terbuat dari aluminium, mempunyai sirine/pemutar musik, dapat digunakan untuk emergency dan evakuasi serta memiliki lampu sorot. Meskipun disisi lain Truk Tangkasaki juga memiliki kelemahan dari segi waktu dan biaya.

b. Bank Sampah

Masalah sampah bukanlah permasalahan yang bisa dibiarkan begitu saja. Diperlukan tindakan nyata dan kerjasama oleh setiap lapisan masyarakat dan bank sampah bisa menjadi solusinya. Timbunan sampah yang terus menumpuk akan berakibat buruk bagi kesehatan lingkungan serta menimbulkan berbagai penyakit dan sampah rumah tangga merupakan penyumbang sampah terbesar. Sementara, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang tersedia tidak akan bisa menampung sampah yang terus menerus dihasilkan masyarakat jika masyarakat tidak mulai bertindak untuk mengurangi sampah yang dihasilkan. Untuk itulah penanganan masalah sampah harus dimulai dari sumbernya. Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyeter adalah warga

yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Tabungan pada Bank Sampah bukan hanya berupa uang, tetapi juga dalam bentuk bahan-bahan pokok rumah tangga, seperti yang dipaparkan oleh salah seorang pengelola Bank Sampah Bersatu Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini sebagai berikut:

“Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya, saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang, tetapi ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak dan beras.” (Wawancara SH, Tanggal 26 Maret 2017)

Hasil wawancara informan dengan Bapak SH di atas menunjukkan bahwa Bank Sampah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang menjadi nasabahnya. Nasabah atau penabung pada Bank Sampah sewaktu-waktu dapat mengambil tabungannya dalam bentuk uang maupun dalam bentuk bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak dan beras.

Wilayah Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,, menjadi percontohan pemanfaatan bank sampah untuk pemberdayaan perempuan dalam penanganan sampah. Sebanyak 50 rumah tangga di Kassi-Kassi telah merasakan manfaat dari Bank Sampah setelah mengumpulkan sampah yang dapat memberikan nilai ekonomis. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang

pengelola Bank Sampah Durian Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Perempuan dan ibu rumah tangga di wilayah Kelurahan Kassi-Kasi mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang, misalnya sampah plastik, karton, dan kertas untuk selanjutnya disetorkan ke bank sampah. Sampah tersebut ditimbang dan kemudian dinominalkan, hasilnya setiap bulan mereka dapat mengambil dalam bentuk uang sesuai jumlah tabungan sampah yang dituliskan dalam masing-masing rekening. (Wawancara MR, Tanggal 26 Maret 2017)

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak MR didapatkan keterangan bahwa perempuan dan ibu rumah tangga di wilayah Kelurahan Kassi-Kasi mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang, misalnya sampah plastik, karton, dan kertas untuk selanjutnya disetorkan ke bank sampah. Sampah tersebut ditimbang dan kemudian dinominalkan, hasilnya setiap bulan mereka dapat mengambil dalam bentuk uang sesuai jumlah tabungan sampah yang dituliskan dalam masing-masing rekening.

Aktivitas Penimbangan Bank Sampah oleh seluruh Staff Kecamatan Rappocini yang diadakan di Bank Sampah Tenar Kantor Camat Rappocini, Jalan Teduh Bersinar. Kegiatan yang rutin dilaksanakan Oleh Seksi Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Rappocini ini rutin diadakan setiap dua kali dalam sebulan di minggu kedua dan keempat dihari Jumat setiap bulannya mulai jam 09.00 pagi sampai dengan jam 11.00 siang. Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sejak kegiatan penimbangan sampah ini rutin dilaksanakan, seluruh Staff Kecamatan Rappocini sebagai nasabah Bank Sampah Tenar, aktif berpartisipasi dalam menabung di Bank Sampah Tenar, mereka mengumpulkan sampah-sampah dari kantor atau rumah masing-masing

seperti botol-botol plastik, kertas atau koran, serta kaleng-kaleng bekas.”(Wawancara FY, Tanggal 23 Maret 2017)

Sesuai hasil wawancara dengan ibu FY, didapatkan keterangan bahwa seluruh Staff Kecamatan Rappocini yang menjadi nasabah Bank Sampah Tenar semakin aktif berpartisipasi mengumpulkan sampah-sampah berupa botol-botol plastik, Koran, kertas serta kaleng-kaleng bekas untuk ditimbang di Bank Sampah Tenar. Aktivitas seperti ini diharapkan mampu menanamkan sikap disiplin kepada semua Staff baik dalam hal kebersihan dan kenyamanan lingkungan karena sampah-sampah mereka diatur dan dikumpulkan dengan baik untuk ditabung yang dapat bernilai investasi bagi para nasabah Bank Sampah

Pada lingkup kelurahan sudah terbentuk Bank Sampah Kelurahan di wilayah masing-masing. Hal ini akan dirangkumkan dengan Bank Sampah Tenar khusus pegawai lingkup kelurahan dan kecamatan. Bank Sampah Teduh Bersinar di prioritaskan mampu membantu Bank Sampah pusat milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocinidalam wawancaranya sebagai berikut:

“Pemerintah Kecamatan Rappocini akan mendirikan Bank Sampah khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rencana tersebut diperuntukkan bagi pegawai tingkat kecamatan dan masing-masing kelurahan di lingkup Kecamatan Rappocini. Sementaramasih direncanakan untuk membuat Bank Sampah khusus PNS Kecamatan dan Kelurahan, namun memang masih menyusun segala kebutuhan Bank Sampah Tenar khusus pegawai tingkat Kecamatan dan Kelurahan.”(Wawancara HS, Tanggal 23 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HS, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Rappocini akan mendirikan Bank Sampah khusus

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Kecamatan dan Kelurahan, Namun saat ini masih direncanakan dan memang masih menyusun segala kebutuhan Bank Sampah Tenar

Pemerintah Kecamatan Rappocini juga menerapkan sistem kontainer sampah siluman dengan tidak memberikan ruang jeda adanya sampah bertumpuk di jalanan hingga beberapa hari. Tidak ada lagi kontainer yang berlabuh lama di terminal sampah. Mereka menerapkan sistem kontainer sampah siluman terkoneksi dengan kendaraan bermotor pengangkut sampah bak terbuka sebagai eksekutor sampah. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Penerapan kontainer siluman tersebut mendukung gerakan Makassar Tidak Rantasa (MTR), sebab diketahui sebelumnya proses pengangkutan sampah dilakukan dengan menyalakan kontainer di terminal sampah di pagi hari hingga akhirnya menumpuk baru diangkat. Cara itu tidak dilakukan lagi, itu merusak pemandangan, sampah masih berserakan diluar kontainer apalagi baunya kemana-mana, mengganggu orang. Dengan sistem ini maka sampah di kontainer akan menghilang karena dieksekusi tim kebersihan setiap saat.” (Wawancara AF, Tanggal 23 Maret 2017)

Kendati julukan kontainer siluman ini diberikan Wali Kota Makassar, melihat respon program pengelolaan sampah yang kreatif dan efektif diterapkan pemerintah Kecamatan Rappocini, pihaknya berharap semua kecamatan memberlakukan itu, bukan hanya di Kecamatan Rappocini saja.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas maka dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan dari teknologi Bank Sampah ini mencapai 95% karena didirikannya Bank Sampah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang menjadi nasabah dari Bank sampah diantaranya dapat menambah penghasilan bagi nasabahnya. Dengan mengumpulkan sampah-sampah

yang dapat didaur ulang, maka nasabah akan mendapatkan imbalan berupa uang yang didapatkan dalam bentuk tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil atau dalam bentuk bahan makanan pokok seperti beras, gula, dan sebagainya. Aktivitas Bank Sampah juga dicanangkan di lingkup Kantor Kecamatan Rappocini dengan nama Bank Sampah Teduh Bersinar atau Tenar. Namun demikian masih banyak masyarakat yang menukar sampah mereka pada pemasok sampah lainnya.

4. Kemitraan

Ada beberapa hubungan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan program Makassar Tidak Rantasa yaitu hubungan Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat, Kerjasama antara Pemerintah (SKPD), Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan dengan Pemerintah dan Masyarakat, Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

a. Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat

Masyarakat disini dapat berperan sebagai jasa pengelola persampahan perkotaan dengan mengikuti konsep pengelolaan persampahan ataupun mengubah gaya hidup mereka menjadi gaya hidup ramah lingkungan dan bebas sampah di lingkungan keluarganya. Tugas pemerintah adalah sebagai pemberi informasi dan sosialisasi terhadap usaha-usaha pengelolaan sampah perkotaan dan menjadi mitra kerja bagi masyarakat yang ingin mengelola dan mengolah persampahan. Keunggulan teknologi yang berupa jaringan internet, smartphone, website, aplikasi smartphone, bisa dimanfaatkan secara optimal untuk membantu pengelolaan persampahan di perkotaan. Secara konseptual di tiap kecamatan wajib

membentuk FORKASIH yang merupakan singkatan dari Forum Kampung Bersih. Forum ini merupakan wadah bagi pemerintah kecamatan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pendukung Gemar Makassar Tidak Rantasa. Dalam Surat Keputusan Walikota Makassar poin ketiga memutuskan bahwa : Mewajibkan kepada para Camat untuk segera membentuk Forum Kampung Bersih dan Hijau (FORKASIH) tingkat kecamatan guna mendukung program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) dengan melibatkan para fasilitator dan kader lingkungan di wilayah masing-masing yang selama ini aktif dalam kegiatan Makassar Green and Clean.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada Kecamatan yang membentuk FORKASIH. Pada umumnya kegiatan antara masyarakat dan pemerintah hanya berupa kerja bakti yang terlebih dahulu disosialisasikan jadwalnya oleh Pemerintah. Di Kecamatan Rappocini dibentuk Relawan Makassar Tidak Rantasa ditingkat masyarakat untuk membantu dalam menjalankan kegiatan Gemar Makassar Tidak Rantasa. dan tenaga untuk membersihkan lingkungan. Jadi mereka yang bertindak sebagai motivasi bagi masyarakat lain supaya ikut membersihkan. Salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kecamatan Rappocini dalam wawancara menjelaskan bahwa:

“Relawan Makassar Tidak Rantasa sebenarnya menginginkan adanya keterlibatan masyarakat sebagai penggerak, jadi bukan cuma pemerintah. relawan itu tidak digaji tapi mau meluangkan waktu dan tenaga untuk membersihkan lingkungan. Jadi dia sebagai motivasi bagi masyarakat lain supaya ikut membersihkan.” (Wawancara FY, Tanggal 23 Maret 2017)

. Keberhasilan program Makassar Tidak Rantasa tercermin dari wujud partisipasi masyarakat yang sadar dan kompak menjaga lingkungannya, seperti

yang diungkapkan oleh Bapak MD selaku Ketua RT 02 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini sabagai berikut:

"Keberhasilan program Makassar Tidak Rantasa (MTR) bukanlah dinilai dari kebersihan lingkungan semata, namun juga harus tercermin pada wujud partisipasi masyarakat yang semakin sadar berpartisipasi dan kompak menjaga lingkungannya," (Wawancara MD, Tanggal 27 Maret 2017)

Salah satu kelurahan yang berhasil menggalang dan membentuk relawan sampah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam program Makassar Tidak Rantasa di Kecamatan Rappocini adalah kelurahan Gunung Sari, seperti yang dituturkan Bapak FJ selaku Ketua RW 05, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut:

"Kelurahan Gunungsari memiliki potensi anak-anak muda pecinta lingkungan, sekalian saja kita ajak anak-anak muda kita untuk menyukseskan program pemerintah dalam hal kebersihan lingkungan, khususnya Makassar ta' Tidak Rantasa yang kita kawal bersama, Bapak Lurah Gunung Sari yang telah sukses mendorong komunitas kepemudaan di lingkungan ini menjadi relawan sampah."(Wawancara FJ, Tanggal 27 Maret 2017)

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak FJ, dapat dianalisa bahwa potensi anak-anak muda pecinta lingkungan di Kelurahan Gunung sari mampu menyukseskan program Makassar Tidak Rantasa dan Bapak Lurah Gunung Sari juga mendukung komunitas kepemudaan menjadi relawan sampah. Relawan sampah yang telah di bina ada di setiap RW, dan masing – masing beranggotakan 10 orang dari masing-masing RW akan arahkan ke tempat yang rawan sampah, dan fasilitas publik seperti pasar, sekolah-sekolah, dan ruko yang dibina dan dikawal oleh organisasi masyarakat atau pemuda. Namun Langkah awal dalam

membina komunitas relawan sampah ini adalah membenahi wadahnya, menyusun AD/ART baru kemudian dilakukan pembekalan dan pembinaan dari pihak swasta yang nantinya juga terlibat sebagai anggota, sehingga relawan sampah ini dapat menjadi profesional, kendati ini adalah kegiatan kemanusiaan

b. Kerjasama Pemerintah dengan SKPD

Kerjasama antara pemerintah merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan tiap program, utamanya Gemar MTR. Pelaksanaan kerja sama ini telah didukung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang pembagian wilayah binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pelaksanaan program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa. Setiap SKPD di Kota Makassar memiliki 2-3 kelurahan yang menjadi wilayah binaan. Pembagian wilayah kerja ini dibuat agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa.

c. Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

Swasta merupakan elemen pendukung dalam setiap program dari pemerintah. Dalam hal ini pihak swasta pada umumnya berperan sebagai penyedia anggaran dalam menjalankan program pemerintah. Dalam pelaksanaan Program Gemar Makassar Ta' Tidak Rantasa beberapa perusahaan swasta telah berperan aktif dalam mendukung setiap kegiatan yang dilakukan. Seperti kegiatan Sampah Tukar Beras yang pada tahun 2014 pemerintah mendapatkan bantuan dana oleh perusahaan. Hal tersebut disebutkan oleh salah seorang Staff Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Kec. Rappocini dalam sebuah wawancara menyebutkan bahwa:

“Untuk tahun 2014 Sampah tukar beras mendapatkan dana dari beberapa perusahaan karena dana untuk itu belum masuk dalam anggaran kami. dana untuk sampah tukar beras itu sumbangan dari perusahaan swasta melalui dinas ketenaga kerjaan.” (wawancara HS, Tanggal 26 Maret 2017)

Selain itu beberapa perusahaan yang mendukung pelaksanaan program Gemar Makassar Tidak Rantasa adalah Bank Mandiri. Dalam sebuah berita online disebutkan :

PT Bank Mandiri Tbk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program Gerakan Masyarakat Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) atau Makassar Bersih yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar. Dana CSR yang diberikan sebesar Rp.672.000.000 kepada Pemerintah Kota Makassar (Parlin. Diakses di <http://moneter.co/bank-mandiri-salurkan-csr-untuk-gemar-mtr/>)

Tidak hanya Bank Mandiri, PT Pelabuhan Indonesia IV juga turut berpartisipasi dalam menyukseskan program Gemar Makassar Tidak Rantasa. PT. Pelindo menyumbangkan truk sampah kepada Pemkot. Dalam berita online antara news disebutkan:

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV memberikan bantuan berupa satu unit truk sampah kepada Pemerintah Kota Makassar sebagai bentuk dukungannya terhadap program Gerakan Masyarakat Makassar Tidak Rantasa/jorok (Gemar MTR). Bantuan berupa truk sampah yang diserahkan itu merupakan bagian dari kepedulian Pelindo terhadap program (Gemar MTR) yang digalakkan Pemkot saat ini. Tidak hanyabantuan truk, PT Pelindo juga memberikan bantuan renovasi taman di sepanjang Anjungan Pantai Losari agar taman-taman itu menjadi bagian dari keindahan kota (Daniel. Diakses di <http://makassar.antarane.ws.com/berita/58667/pt-pelindo-sumbang-truk-sampah>)

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa cukup efektif dari sisi adaptasi.Hal tersebut karena dalam hubungan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan tersebut sudah berjalan cukup baik.Partisipasi dari ormas, swasta dan pemerintah itu cukup

baik. Namun, bukan berarti kegiatan ini tidak memiliki kekurangan. Dari sisi partisipasi masyarakat belum ada peningkatan secara signifikan. Selain itu yang masih menjadi kekurangan adalah belum adanya Forum kerjasama antara pemerintah dan masyarakat seperti FORKASIH.

Perusahaan jasa Telekomunikasi PT Telkomsel ikut mendukung program Pemerintah Kota Makassar yakni Gerakan Masyarakat Makassar Tidak Rantasa/jorok (Gemar MTR). Telkomsel turut mengambil peran dengan mengajak seluruh sekolah untuk menjaga kebersihan melalui program "Sekolahta Tidak Rantasa". Gerakan bersih-bersih di sekolah dan lingkungan sekitar sekolah ini dilaksanakan setiap bulannya di tanggal sembilan jam sembilan. Bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar serta mendapat dukungan penuh dari Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Dukungannya itu yang mengambil percontohan tiga sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan program dan mendapat kunjungan dari Telkomsel yaitu SMAN 3 Makassar, SMPN 27 Makassar, SMKN 9 Makassar, selanjutnya akan menyusul sekolah sekolah berikutnya untuk mensosialisasikan program ini. Program Sekolahta Tidak Rantasa ini merupakan program turunan dari Program Makassarta Tidak Rantasa yang telah diluncurkan oleh Wali Kota Makassar pada tanggal 29 Agustus 2014 di SMPN 30 Makassar. Dukungan Telkomsel dalam program ini dengan memasang spanduk imbauan dan membagikan kantong sampah di sekolah sekolah yang ada di Makassar yang hampir keseluruhan juga merupakan anggota Komunitas Telkomsel School Community (TSC). Dia juga mengatakan jika program yang dilaksanakannya

diyakini bisa memicu semangat para guru dan pelajar. Dalam kegiatan ini Telkomsel mengadakan pemilihan sekolah terbersih dari tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK baik negeri maupun swasta yang akan diumumkan di hari ulang tahun Kota Makassar.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama PT. Unilever cabang Makassar bekerjasama melakukan pengembangan program Bank Sampah. Jika sebelumnya, sampah yang dikumpulkan masyarakat dapat ditukarkan dengan beras ataupun uang dalam bentuk tabungan, kini sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan di Bank Sampah dapat ditukarkan dengan produk Unilever seperti sabun, deterjen, margarin, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Bank sampah sebagai pendukung program Makassar? Tidak Rantasa (MTR) tidak hanya efektif memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan dan memanfaatkan sampah menjadi barang ekonomis namun juga berdampak pada peningkatan positif interaksi sosial masyarakat.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1. Faktor Pendukung

a) Tingginya Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat yang dinilai sudah tinggi dan selain itu bentuk dan peran serta masyarakat dengan cara mobilisasi dan kegiatan pemberian jadwal kerja bakti juga dinilai sangat tinggi hal ini bisa kita lihat hampir setiap hari bahkan setiap minggu Kelurahan-kelurahan Kecamatan Rappocini, masyarakat bersama Dinas terkait melakukan kegiatan kerja bakti. Partisipasi lain dari masyarakat yaitu dengan menjadi nasabah Bank Sampah. Banyak masyarakat

sangat antusias Menjadi nasabah bank sampah dengan alasan keuntungan ekonomis. Seperti diketahui rata-rata nasabah bank sampah adalah ibu rumah tangga, dimana hasil dari penjualan sampah dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun ada juga masyarakat menjadi nasabah bank sampah karena kepedulian terhadap lingkungan sekitar

b) Sarana prasarana yang memadai

Sarana transportasi pengangkutan sampah tidak hanya dilakukan oleh truk, tapi juga mobil box Tangkasaki dan juga transportasi lainnya, Seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

**Daftar Nama Sarana Transportasi Pengangkut Sampah
Kecamatan Rappocini**

NO	KELURAHAN	DUM TRUK	TANGKASAKI	RODA 3 PEMKOT	RODA 3 MANDIRI	RODA 3 BKM	RODA 3 SWASTA	GROBAK BECAK
1	RAPPOCINI	1 Unit	1 Unit	4 Unit	-	-	-	-
2	BUAKANA	1 Unit	1 Unit	5 Unit	2 Unit	-	-	2 Unit
3	BANTA- BANTAENG	2 Unit	2 Unit	7 Unit	4 Unit	-	2 Unit	-
4	BALLAPARANG	1 Unit	1 Unit	6 Unit	2 Unit	-	1 Unit	2 Unit
5	TIDUNG	2 Unit	1 Unit	5 Unit	2 Unit	-	6 Unit	3 Unit
6	BONTOMAKKIO	-	1 Unit	3 Unit	1 Unit	-	-	-
7	MAPPALA	1 Unit	1 Unit	4 Unit	-	1 Unit	1 Unit	4 Unit
8	KASSI-KASSI	1 Unit	1 Unit	4 Unit	2 Unit	-	2 Unit	3 Unit
9	KARUNRUNG	1 Unit	1 Unit	4 Unit	3 Unit	-	3 Unit	2 Unit
10	GUNUNG SARI	2 Unit	3 Unit	8 Unit	2 Unit	-	13 Unit	5 Unit
	JUMLAH	12 Unit	13 Unit	50 Unit	16 Unit	1 Unit	28 Unit	21 Unit

Sumber: Kantor Kecamatan Rappocini 2017

2. Faktor Penghambat

Telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan di Kota besar adalah sampah. Maka dari itu dengan Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa diharapkan masalah persampahan yang dialami oleh Kota Makassar dapat teratasi. Ini merupakan langkah yang cukup baik yang diambil oleh Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Akan tetapi bukan berarti kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota tidak memiliki kekurangan. Penulis mencoba memberi analisis kritis terhadap kekurangan-kekurangan dalam penanganan persampahan khususnya terkait akan pelaksanaan program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa. Menurut penulis kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Kota Makassar kurang maksimal. Beberapa hal yang membuat kegiatan tersebut berjalan kurang maksimal adalah:

a) Program Tidak Memiliki Batasan Waktu

Berdasarkan teori efektivitas dari Richard M Streers yang menyebutkan setiap program harus memiliki periodik dan pentahapan capaian. Penulis menilai bahwa salah satu kekurangan dari pelaksanaan program Makassar Ta Tidak Rantasa adalah tidak memiliki jangka waktu. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa program ini tidak memiliki rencana pelaksanaan jangka pendek yang membuat yang berdampak tidak adanya capaian jangka pendek. Hal tersebut yang membuat program ini sulit untuk dinilai capaian pelaksanaan program. Hal ini jelas membuat program ini sulit untuk dievaluasi

b) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Alasan Masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam program bank sampah dikarenakan harga sampah terlalu rendah. Sebagaimana diketahui harga

sampah di pengepul lebih tinggi dari harga yang diterapkan bank sampah, sehingga ada beberapa masyarakat yang menjual sampah bukan pada bank sampah melainkan ke pengepul sampah. Ada juga masyarakat yang beralasan Sulit mengumpulkan sampah dan ada pula yang beralasan tidak punya waktu untuk mengumpulkan sampah karena faktor kesibukan

c) Kurangnya Sosialisasi Dari Pemerintah

Pemerintah Kota Makassar telah mensosialisasikan kebijakan program Makassar ta' Tidak Rantasa' dan Program-program lain melalui media cetak dan elektronik. Hal ini dimaksudkan agar program-programnya dapat diketahui oleh semua lapisan masyarakat, (misalnya kegiatan kerja bakti kapan waktu dan dimana lokasinya, sarana dan prasana yang harus dibawa, komunikasi atau penyampaian kepada masyarakat/stakeholder sekurang-kurangnya satu bulan sebelum hari H agar masyarakat bisa mengatur waktunya). Namun demikian berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini bahwa sosialisasi kurang efektif, (terlalu dekat antara penyampaian informasi dengan pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat kurang siap). Selain dari pada itu sosialisasi kurang menyentuh di pelosok-pelosok kota dan perumahan-perumahan sehingga partisipasi masyarakat sangat kurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya terkait Implementasi Program Makassar Tidak Rantasa di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Program Makassar Tidak Rantasa di Kecamatan Rappocini dapat dikatakan mengacu pada PERDA Nomor 4 Tahun 2011 yang menitikberatkan pada : a) Program Pengurangan Sampah, efektivitas program Makassar Tidak Rantasa dapat dilihat dari keberhasilan program Lorong Garden (Longgar), Kerja Bakti, Sosialisasi Program Makassar Tidak Rantasa, dan Sampah Tukar Beras. b) Sarana Prasarana, Truk Tangkasaki merupakan alat pengangkut sampah terbaru dengan teknologi Rotater dan GPS, juga menggunakan Jet Pump, bak tertutup sehingga sampah tidak akan berjatuh dan menebar bau tidak enak, kemudian teknologi Bank Sampah yang memberikan banyak manfaat ekonomis. Dengan menjadi nasabah Bank Sampah maka masyarakat dapat menukar sampah dengan uang atau beras. c) Kemitraan, program Makassar Tidak Rantasa dapat dilihat dari hubungan kerjasama dengan Pemerintah, kerjasama dengan Masyarakat, kerjasama dengan pihak swasta (PT Telkom, PT Unilever, PT Pelindo IV, Bank Mandiri)
2. Faktor Pendukung dari program Makassar Tidak Rantasa yaitu Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan sarana prasarana yang memadai sedangkan Faktor penghambatnya yaitu Program Makassar Tidak Rantasa

tidak memiliki Perda maupun Perwali, Tidak ada batasan waktu, masih kurangnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Makassar harusnya lebih proaktif dalam mensosialisaikan kegiatan ini kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat untuk mencintai kebersihan dapat terwujud.
2. Pemerintah Kota Makassar harusnya membuat atauran pelaksanaan program Makassar Tidak Rantasa beserta capaian jangka pendek dan menengah agar program ini mudah untuk dievaluasi.
3. Pemerintah harus aktif menjalin kerjasama dengan semua elemen baik swasta, ormas, utamanya masyarakat untuk membuat Makassar bersih dan terhindar dari masalah persampahan



DAFTAR PUSTAKA

- Andrea Di Maio, 2012. *Smart Government: Sustainable, Affordable, Innovative*, Worldwide Government Solutions Forum.
- Guntur,Setiawan, 2004, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Nugroho, Riant, 2004, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
- Pasolong,Harbani,2007, Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Subarsono, AG, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2011 *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*,.Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta
- Tangkililisan, Hessel Nogi, 2003, Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta: Lukman Offset
- Usman dkk, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- , 2003, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, Jakarta: Ciputat Press
- Usman, Nukma, 2015, Makassar Smart City Solusi Sebuah Kota Maju, Makssar: Badan Arsip & Perpustakaan
- Wahab, Solichin, 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press